



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejari Siap Bantu Pemulihan Kelebihan Bayar Rp 3,5 Miliar

KOTA MANNA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan (BS) telah sepakat membantu upaya pemulihan kelebihan bayar perjalanan dinas anggota DPRD Bengkulu Selatan tahun 2023 lalu. Sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kelebihan bayar perjalanan dinas anggota mencapai Rp3,5 miliar. Oleh sebab itu DPRD Bengkulu Selatan meminta bantuan Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan membantu melakukan pemulihan kelebihan bayar tersebut. Sebagaimana dalam perjanjian kerja sama atau MoU antara Kejari Bengkulu Selatan dengan Sekretariat DPRD Bengkulu yang baru saja dilakukan. Dalam wawancara bersama RB, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Nurul Hidayah, SH MH mengatakan, jaksa merupakan pengacara negara. Oleh sebab itu jaksa siap membantu memulihkan keuangan negara yang digunakan tidak sesuai aturan. "Kalau dalam SKK MoU ini nanti pihak Sekretariat DPRD mengajukan permintaan bantuan untuk pemulihan TPTGR, kami siap. Tapi nanti akan ditelaah lagi oleh tim JPN, apakah itu (pemulihan TPTGR) masuk dalam ranah Dautun atau tidak," kata Kajari. Adapun perjanjian kerjasama dengan Sekretariat DPRD mencakup seluruh kegiatan di lembaga legislatif tersebut. Terkait apa saja yang akan dituangkan dalam Satuan Kerja Khusus (SKK) MoU, pihak Kejari sebut Nurul menunggu penyampaian dari Sekretariat DPRD. "Penandatanganan MoU Senin, 12 Februari 2024, mencakup seluruh kegiatan di lembaga DPRD. Mengenai nanti soal itu (temuan kelebihan bayar perjalanan dinas

anggota dewan), kami menunggu pengajuan SKK dari Sekretariat DPRD, apakah itu dimasukkan atau tidak," sambung Kajari. Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Barli Halim SE berharap dengan perjanjian kerja sama antara DPRD dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan ada pemulihan Keuangan Negara. Oleh sebab itu Barli menyetujui Sekretariat DPRD Bengkulu Selatan melakukan dengan Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Selain itu MoU ini sambung Barli akan memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam hal melaksanakan kegiatan. "Tentu MoU ini sangat bagus. Sekretariat DPRD akan lebih mudah untuk berkomunikasi terkait kegiatan di lembaga. Kejaksaan tentu lembaga yang lebih memahami terkait aturan dan diharapkan ada masukan dan bimbingan," kata Barli. Terkait temuan kelebihan bayar biaya perjalanan dinas, Barli menegaskan bahwa hal itu tanggung jawab personal masing-masing anggota dewan. Sebagai pimpinan lembaga, Barli berharap agar hal itu cepat ditindaklanjuti dan diselesaikan sebelum masa waktu berakhir. "Kalau saya sebagai pribadi, tentu siap menindaklanjuti," tukas Barli. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan audit terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bengkulu Selatan tahun 2023. Dan dalam audit tersebut, lagi-lagi ada temuan dalam pemeriksaan belanja daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan temuan tersebut hingga Rp5 miliar tahun 2023 pada kelebihan bayar.

Temuan tersebut pada 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bengkulu Selatan. Berikut item temuan itu berada di sektor Perjalanan Dinas untuk 25 Anggota DPRD Bengkulu Selatan dengan nilai sebesar Rp3,5 Miliar. Dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada bidang jalan dan jembatan senilai Rp1,5 miliar. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan mendesak agar temuan tersebut bisa diselesaikan oleh pihak-pihak terkait khususnya dua OPD tadi. Apabila temuan itu tidak ditindaklanjuti selama waktu 60 hari pasca temuan 12 Januari 2024, maka siap-siap saja proses penagihan akan diambil alih oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan, Hamdan Syarbaini S.Sos mengatakan, untuk saat ini upaya penagihan sudah terus diupayakan, salah satunya menyurati OPD terkait, sayangnya sejak LHP dikeluarkan dua OPD tersebut diketahui belum pernah mencicil sama sekali. Selain itu untuk OPD-OPD yang lain, proses pengembalian sudah dilakukan, sebab rata-rata nilai tidak terlalu besar. "Sudah kita surati untuk diselesaikan secepat mungkin, namun sampai hari ini, tidak ada yang menggubris, silakan nanti APH yang mengambil alih," kata Hamdan Syarbaini. Di sisi lain, untuk temuan nilai yang terkecil ada di Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yakni Rp3 juta, dan diketahui temuan itu sudah dikembalikan. **(tek)**